

Bidang Ilmu: Kebijakan Publik

Program Studi: Pendidikan
Kewarganegaraan

**PROPOSAL
PENELITIAN MANDIRI**



**PEMBANGUNAN HOTEL DAN MAL DI YOGYAKARTA
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DAN
MULTIKULTURALISME**

Oleh:
Dr. Suharno, M.Si.

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : Pembangunan Hotel dan Mal di Yogyakarta dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Multikulturalisme
- b. Jurusan : S2 PPKn
- c. Bidang Penelitian : Pendidikan Kewarganegaraan
2. Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Dr. Suharno, M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 19680417 200003 1 001
- d. Disiplin Ilmu : Kebijakan Publik, Sosiologi Politik
- e. Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
- f. Jabatan : Lektor Kepala
- g. Prodi/Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
- h. Alamat : Lantai 3 Gedung Pusat Fakultas Ilmu Sosial UNY Karangmalang 55281 Yogyakarta
- i. Telp/email : (0274) 586168 psw. 348
- j. Alamat Rumah : Jl.Kaper Nitikan UH VI/337 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta
- k. Telp/email : (0274) 8296337 / HP: 081313949490, suharno1968@yahoo.com
3. Jumlah Anggota Peneliti : Mandiri
4. Lokasi Penelitian : D.I. Yogyakarta Indonesia
5. Kerjasama institusi lain : -
6. Lama Penelitian : 5 (lima) bulan
7. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp 15.000.000,-

Yogyakarta, 14 Maret 2016
Peneliti,

Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 19680417 200003 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan PKN dan Hukum

Menyetujui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

Dr. M. Murdiono, M.Pd.
NIP. 19780630 200312 1 002

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Yogyakarta sebagai Kota Budaya telah terganggu eksistensinya. Raden Mas Wijoseno Hario Bimo yang kini menjadi Adipati Kadipaten Pakualaman bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam X menyampaikan bahwa kepemimpinannya di Kadipaten Pakualaman akan lebih banyak fokus pada kebudayaan sebab menurutnya Yogyakarta kini tidak lagi mencerminkan Kota Budaya dikarenakan keberadaan hotel-hotel yang tidak tertata. Itu sebagaimana yang ia katakan bahwa: “Bukan mau omong soal Budaya adiluhung begini begitu, *lha wong* kenyataannya Yogyakarta Kota Budaya tetapi penuh dengan hotel yang tidak tertata, tidak mencerminkan Kota Budaya” (Harian Kompas, 2016: 16).

Sesuai data Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta tahun 2014 dapat diketahui bahwa memang hotel di Yogyakarta jumlahnya terus meningkat dari tahun 2010 yang jumlahnya 367 menjadi 419 pada tahun 2014. Hotel-hotel tersebut berada di hampir seluruh Kecamatan di Kota Yogyakarta dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Gedongtengen yakni 121 hotel disusul kecamatan Mergasan yakni 67 hotel dan Umbulharjo yakni 45 hotel (BPS Kota Yogyakarta, 2015: 17). Kondisi serupa nampak pada pembangunan mal sebagai pusat perbelanjaan berskala besar di Yogyakarta yang kini jumlahnya sudah lebih dari 12 mal dan tersebar di dalam Kota Yogyakarta dan di seputar Jalan lingkar kota Yogyakarta (*Ring Road*). Kesemrawutan itu ditambah dengan keberadaan pusat perbelanjaan berkala menengah yang juga lebih banyak. Persebaran hotel dan mal semacam itu lebih mengarah pada perwujudan Yogyakarta sebagai Kota Metropolitan ketimbang Kota Budaya.

Kondisi Yogyakarta yang semakin penuh dan sempit oleh keberadaan hotel maupun mal tidak sebangun dengan kenyataan bahwa Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia yang tersusun atas kondisi masyarakatnya yang multikultur. Yogyakarta sebagai daerah multikultural, menghadapi potensi konflik yang tinggi antar elemen pembentuk multikulturalismenya. Anasir konflik dapat bermula dari persoalan perbedaan identitas hingga perjuangan

pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Elemen identitas yang berbeda berupa etnis, agama, adat istiadat, bahasa dan lain-lainnya secara alamiah merupakan penanda keberagaman yang secara sosial dapat memunculkan friksi atau gesekan. Perlu ruang koeksistensi (*space of co-existence*) bagi sebagian besar identitas yang ada agar minimalisasi potensi konflik dapat dimungkinkan (Harold J. Laski, 1947; Miriam Budiardjo, 1996). Keberadaan hotel dan Mal oleh dan untuk kalangan menengah atas tentu akan memperlebar kesenjangan dimasyarakat dan mempersempit ruang koeksistensi (*space of co-existence*) bagi sebaagian besar identitas masyarakat di Yogyakarta. Dengan demikian, potensi konflik antar elemen masyarakat Yogyakarta yang multikultur akan semakin besar. Maka, maraknya pembangunan hotel dan mal adalah persoalan bagi kelangsungan Kota Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia.

Berdirinya hotel dan mal di Yogyakarta tidak lepas dari persoalan pemberian perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Yogyakarta. Ini menjadi persoalan karena peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah yang digunakan sebagai payung hukum pemberian ijin pendirian hotel dan mal merupakan suatu kebijakan publik yang menurut Chandler dan Plano (1988 dalam Tangkilisan, 2003: 13) seharusnya ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Namun keberadaan hotel dan Mal di Yogyakarta yang didasari kebijakan publik dari pemerintah daerah justru berpotensi besar memunculkan persoalan publik (masyarakat). Dengan demikian, dapat disinyalir adanya ketidaktepatan pemilihan kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah di Yogyakarta atas maraknya pendirian hotel dan Mal di Yogyakarta.

Dengan latar belakang tersebut, menjadi penting untuk melakukan studi ilmiah mengenai kebijakan pembangunan hotel dan Mal di Yogyakarta. Wilayah Yogyakarta yang dimaksud adalah wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman khususnya yang berada dalam jalur lingkaran Kota Yogyakarta (*Ring Road*). Mengapa wilayah yang dikelilingi oleh jalur lingkaran

Kota Yogyakarta (*Ring Road*)? Di samping karena wilayah tersebut telah mencakup seluruh wilayah administratif Kota Yogyakarta, secara geografis wilayah tersebut juga paling mencerminkan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pembangunan hotel dan mal di Yogyakarta dalam perspektif kebijakan publik?
2. Bagaimana relasi antara kebijakan pembangunan hotel dan mal di Yogyakarta dengan kondisi Yogyakarta sebagai Kota Multikultural?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji Pembangunan Hotel dan Mal di Yogyakarta dalam Perspektif Kebijakan Publik
2. Menelaah Relasi antara Kebijakan Pembangunan Hotel dan Mal di Yogyakarta dengan kondisi Yogyakarta sebagai Kota Multikultural

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua level. *Pertama*, level teoretik. Secara teoretik, penelitian akan menambah khazanah ilmiah mengenai kebijakan pembangunan hotel dan Mal di Yogyakarta. Di sisi lain, kajian penelitian ini dapat memperkaya studi kebijakan publik kaitannya dengan bidang analisis kebijakan.

Kedua, level praktis. Penelitian ini akan memberikan perspektif bagi masyarakat dan pengambil kebijakan di Yogyakarta untuk perbaikan kebijakan pembangunan hotel dan Mal di Yogyakarta, khususnya agar dapat sejalan dengan Visi Yogyakarta sebagai Kota Kebudayaan yang multikultur.

Bab II. Tinjauan Pustaka

A. Kebijakan Publik

Langkah efektif untuk mawadahi permasalahan pembangunan Hotel dan Mal adalah dengan mengadopsinya dalam suatu kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga formal. Produk kebijakan publik yang dikeluarkan oleh lembaga formal memiliki keefektifan yang tinggi, karena pejabat formal merupakan bagian integral dari negara yang memiliki alat pemaksa untuk berlakunya kebijakan publik tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat dijalankan.

Sebelum melangkah pada pembahasan kebijakan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta, sekiranya perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kebijakan publik. Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Budi Winarno dan Sholichin Abdul Wahab (dalam Suharno, 2010: 11) sepakat bahwa istilah kebijakan penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan *grand de sign*. Richard Rose (1969) sebagai pakar ilmu politik menyarankan kebijakan hendaknya sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan serta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu (Suharno, 2010: 12).

Edi Suharto (2013: 3) berpendapat bahwa kebijakan (*Policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negar, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Sedangkan Thomas R. Dye (1975 dalam Samodra Wibawa, 2011: 2) mengatakan, bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Makna demikian mengarah pada suatu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan

perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Muchlis Hamdi, 2014: 37).

Itu sejalan dengan Wayne Parsons (2006: 22) bahwa kebijakan publik adalah: “*political sagacity, statecraft, prudent conduct, craftiness, course of action adopted by government, party, etc*”. Selain itu, Menurut Chandler dan Plano (1988) kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas (Tangkilisan, 2003: 13).

Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut kebijakan pemerintahan sebab ia merupakan output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintahan negara, disamping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik dan pelayanan publik. Kebijakan publik disusun secara terus-menerus oleh pemerintah berdasarkan kepemilikan atas sumberdaya-sumberdaya yang ada guna memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.

B. Multikulturalisme

Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, oleh Parekh (1997) dalam Kenneth Thomson, ed., (1997: 88) dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

Kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Keempat, kritikal atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Dalam penggunaannya, istilah multikulturalisme sering dipertukarkan dengan pluralisme. Untuk mengkaji lebih jernih multikulturalisme, perlu dicermati pemetaan yang dikemukakan oleh Bhikku Parekh atas masyarakat multikultural (Hairus Salim dan Suhadi, 2000, 103-106). *Pertama*, adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka memiliki keyakinan dan praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan cara hidup yang berlainan. Mereka tidak berkeinginan untuk melahirkan budaya alternatif, akan tetapi menganekaragamkannya dengan kehadiran mereka yang berbeda tersebut. Parekh menyebut kelompok ini sebagai keberagaman subkultur (*subculture diversity*).

Kedua, kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk kemudian berupaya mengkonstruksinya kembali. Parekh menyebut fenomena ini sebagai keanekaragaman pandangan (*perspectival diversity*).

Ketiga, kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan praktek keyakinan yang berlainan. Gejala ini disebut keanekaragaman komunal (*communal diversity*).

Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan salah satu, dua, atau ketiga klasifikasi tersebut.

Berbeda dengan pluralisme yang ruang lingkungannya pada sub komponen yang besar-besar seperti agama, suku, dan ras, multikulturalisme mencakup komponen yang lebih “mikro” lagi, seperti bahkan pemikiran dan gaya hidup.

Benang merah dari paparan tersebut, multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (*demand*). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, oleh Parekh dibedakan menjadi lima macam. Pertama, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

Kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Ketiga, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Keempat, kritis atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. Kelima, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan committed kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Dalam penggunaannya, istilah multikulturalisme sering dipertukarkan dengan pluralisme. Untuk mengkaji lebih jernih multikulturalisme, perlu dicermati pemetaan yang dikemukakan oleh Bhikku Parekh atas masyarakat multikultural. Pertama, adalah kelompok masyarakat yang memiliki budaya sebagaimana umumnya masyarakat, namun dalam beberapa hal mereka memiliki keyakinan dan praktek keyakinan yang berbeda sesuai dengan wilayah kehidupan dan cara hidup yang berlainan. Mereka tidak berkeinginan untuk melahirkan budaya alternatif, akan tetapi menganeekaragamkannya dengan kehadiran mereka yang berbeda tersebut. Parekh menyebut kelompok ini sebagai keberagaman subkultur (*subculture diversity*).

Kedua, kelompok masyarakat yang di dalamnya ada kalangan yang kritis terhadap berbagai nilai dan prinsip utama yang ada dalam budaya dominan masyarakat tersebut, untuk kemudian berupaya mengkonstruksinya kembali. Parekh menyebut fenomena ini sebagai keanekaragaman pandangan (*perspectival diversity*).

Ketiga, kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang berbeda, terorganisir dengan baik, dan mereka memiliki hidup dengan sistem keyakinan dan praktek keyakinan yang berlainan. Gejala ini disebut keanekaragaman komunal (*communal diversity*).

Jadi, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang komponennya menggambarkan salah satu, dua, atau ketiga klasifikasi tersebut. Berbeda dengan pluralisme yang ruang lingkungannya pada sub komponen yang besar-besar seperti agama, suku, dan ras, multikulturalisme mencakup komponen yang lebih “mikro” lagi, seperti bahkan pemikiran dan gaya hidup.

Benang merah dari paparan tersebut, multikulturalisme merupakan konsep pengelolaan masyarakat yang secara kultural majemuk, sekecil apapun tingkat dan lingkup kemajemukan budaya tersebut, dengan memberikan pengakuan (rekognisi) atas eksistensi komponen kemajemukan tersebut. Pengakuan tersebut dalam fenomena kontemporer merupakan tuntutan (demand). Oleh karenanya ketiadaan pengakuan, yang berarti nihilnya pemenuhan tuntutan, sangat potensial terhadap munculnya berbagai konflik.

C. Yogyakarta Sebagai Kota Multikultural

Multikultural merupakan gabungan dari kata multi (plural) dan kultural (budaya) yang artinya banyak budaya atau keragaman budaya. Sedangkan, multikulturalisme merupakan cara pandang yang menekankan interaksi serta memperhatikan keberadaan setiap kebudayaan sebagai entitas yang memiliki hak-hak setara. Dalam pandangan Lawrence Blum dalam (Andre Ata Ujian, 2011: 14), multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. Menurut Dwicipta dalam (Andre Ata Ujian, 2011: 14), multikulturalisme merupakan cara pandang tentang manusia, tetapi bukan cara pandang yang menyamakan kebenaran-kebenaran lokal, melainkan membantu pihak-pihak yang saling berbeda untuk dapat membangun sikap saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan dan kemajemukan agar tercipta perdamaian dan kesejahteraan.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota kuno di Indonesia yang semakin berkembang baik dari segi pembangunan maupun dinamika masyarakatnya. Saat ini Kota Yogyakarta menjadi ibukota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dikenal sebagai kota pelajar serta menjadi salah satu pusat kebudayaan di Jawa (Inajati Adrisijanti, 2007: 1).

Sebagai kota tujuan masyarakat dari berbagai daerah bahkan manca negara, Kota Yogyakarta memiliki struktur masyarakat yang majemuk. Sejak abad ke-18, penduduk kota Yogyakarta sudah bersifat majemuk, selain orang pribumi (orang Jawa), terdapat pula orang Cina, Arab, Bugis dan Eropa (Inajati adrisijanti, 2007: 1). Pada abad ke-20 kota Yogyakarta semakin majemuk seiring dengan berkembangnya sektor pendidikan, dimana penduduk dari berbagai daerah di Indonesia berbondong-bondong mendatangi Yogyakarta untuk menimba ilmu, bekerja atau bermukim. Tidak salah jika Sultan mengatakan bahwa Yogyakarta merupakan “Miniatur Indonesia” (Lucia Junungsih, 2015: 2). Kota Yogyakarta sebagai kota yang unik baik dari segi

penduduk, budaya maupun sistem pemerintahan menarik dan penting untuk dikaji.

Kota Yogyakarta sebagai daerah yang multikultural tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sejarah. Kedatangan orang Tionghoa dan orang Arab di kota Yogyakarta berkaitan dengan aktivitas perdagangan. Sama halnya dengan kedatangan orang-orang Belanda ke kota Yogyakarta yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan ekonomi yakni usaha perkebunan dan pabrik. Dalam perkembangannya, orang eropa bermukim di Yogyakarta karena berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan mewartakan agama. Dapat dikatakan, paling tidak pada abad ke-18 penduduk Yogyakarta telah memiliki masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk memiliki berbagai golongan sosial yang masing-masing memainkan peran ekonomi yang berbeda. Setiap golongan tersebut memegang budaya, adat istiadat, agama, bahasa, dan pandangan hidup sendiri. Relasi sosial terjalin berdasarkan status sosial, warna kulit dan agama.

Selain struktur masyarakat yang majemuk, Kota Yogyakarta juga memiliki pemukiman yang menarik dan unik. Dimana pemukiman penduduk tersebar dalam beberapa kawasan. Antara lain, Pacinan yakni pemukiman orang-orang Tionghoa, Kampung Sayidan merupakan tempat bermukim orang Arab, Kampung Gerjen tempat bermukim penjahit, Kampung Dagen tempat bermukim tukang kayu, Kampung siliran tempat bermukim Abdi Dalem Silir (mengurus lampu), Kampung Gamelan tempat bermukim Abdi Dalem Gamel (pemelihara kuda), Mangkubumen yakni tempat tinggal Pangeran Mangkubumi, Kampung Wijilan yakni tempat tinggal Pangeran Wijil, dan Kampung Bugisan yakni pemukiman abdi dalem Prajurit Bugis. Orang Eropa tinggal di kawasan utara keraton (Gedung Agung), Benteng Vredeburg, Bintaran, Gereja Margamulya dan Kidul Loji, serta Loji Kecil. Pemukiman atau kampung-kampung itu menunjukkan status sosial, profesi, dan etnis dari penghuninya (Inajati adrisijanti, 2007: 3).

Multikulturalisme di Kota Yogyakarta semakin terlihat seiring dengan berkembangnya kota ini. Salah satu sebab Kota Yogyakarta semakin

multikultur adalah hadirnya penduduk dari berbagai daerah untuk belajar. Otomatis para pelajar tersebut membutuhkan tempat tinggal sementara. Hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia memiliki Asrama Daerah, yang tujuan utamanya untuk memfasilitasi pelajar daerah untuk melanjutkan studinya di Yogyakarta. Di Kota Yogyakarta terdapat kurang lebih 73 asrama Daerah. Dimana Asrama Daerah tersebut dimiliki oleh Pemerintah Daerah masing-masing (www.republik.co.id). Banyaknya pelajar yang berdatangan di Kota Yogyakarta mengundang para pengusaha untuk berlomba-lomba membangun hunian, baik dalam bentuk kos, asrama maupun hotel. Hunian tersebut ditempati oleh pelajar yang memiliki latar belakang etnis, agama, budaya yang berbeda-beda. Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa Yogyakarta merupakan kota yang multikultur bahkan disebut pula sebagai miniatur Indonesia (Lucia Juningsih, 2015: 7).

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati (Molleong, 1991: 3).

B. Sumber Data/Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subjek dari mana data diperoleh. Suharsimi Arikunto (2002: 107) mengklasifikasi sumber data menjadi tiga jenis ; a. *person*, yaitu sumber data berupa orang. b. *place*, yaitu sumber data berupa tempat, dan c. *paper*, yaitu sumber data berupa simbol. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *person* dan *paper*. Sumber data tersebut berupa

buku-buku, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dan internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan kepada informan-informan kunci tentang pembangunan Hotel dan Mal di Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Yang dimaksud adalah pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal dalam artian pengkajian langsung atas dokumen, sedangkan yang bersifat eksternal berupa sumber-sumber yang mendukung pengkajian atas dokumen. Dokumen internal yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan terkait pembangunan Hotel dan mal di Yogyakarta dan dokumentasi lainnya.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, *chek list* dan *recording note*. Pedoman wawancara merupakan instrumen pokok untuk mendapatkan data primer. Sedangkan *check list* dan *recording note* tersebut digunakan untuk melacak dan merekam data sekunder yang dihasilkan melalui dokumentasi.

E. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2002: 178). Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu *paper* dengan *paper* yang lain; buku dengan dokumen, buku satu dengan buku yang lain, atau dokumen yang satu dengan dokumen yang lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 1989: 205) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data induktif. Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang menurut Sayekti Pujosuwarno (1992 : 19), meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan penyaringan data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Display data

Display data yang dilakukan berupa penyajian secara deskriptif atau naratif data yang telah direduksi dalam bentuk laporan yang sistematis.

3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya.

BAB IV. JADWAL PELAKSANAAN

Penelitian ini akan dilaksanakan sejak bulan April sampai bulan Agustus tahun anggaran 2016. Dengan penjabaran jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

KEGIATAN	BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV				BULAN V			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PERSIAPAN PENELITIAN																				
Pengurusan perizinan	■	■																		
Pembuatan desain penelitian			■	■																
PELAKSANAAN PENELITIAN																				
Pelacakan literature					■	■	■													
Pelacakan dokumentasi								■	■	■										
<i>Listing</i> data											■	■								
Analisis data													■	■	■					
Uji validitas																■				
PENYUSUNAN LAPORAN, SEMINAR DAN PELAPORAN																				
Pembuatan Laporan Penelitian																	■			
Seminar Hasil Penelitian																		■		
Revisi Hasil Penelitian																			■	
Penggandaan Laporan																				■
Penyetoran laporan Penelitian																				■

BAB V. PERSONALIA PENELITIAN

- a. Nama dan Gelar Akademik : Dr. Suharno, M.Si.
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata, III/c, 132255131
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- d. Bidang Keahlian : Sosiologi Politik/Pendidikan
Multikultural
- e. Program Studi/Fakultas : Pendidikan Kewarganegaraan/Fakultas
Ilmu Sosial
- f. Waktu untuk Kegiatan ini : 12 jam/minggu

BAB VI. PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN

Berikut ini penjabaran estimasi biaya penelitian:

PEMASUKAN			
Anggaran DIPA FIS UNY tahun 2016		10.000.000	
	JUMLAH		10.000.000
PENGELUARAN			
Honor Peneliti			
Peneliti	5 bln x Rp 300.000	1.500.000	
		1.500.000	1.500.000
ATK dan Persiapan Penelitian			
Kertas HVS	2 rim x Rp 50.000	100.000	
Penggandaan surat&proposal penelitian	10 bendel x Rp 20.000	200.000	
Akomodasi, komunikasi & Transportasi perizinan	20 hari x Rp 350.000	700.000	
	Sub Jumlah	1.000.000	1.000.000
Pelaksanaan Penelitian			
Pelacakan dan pengadaan buku	20 exp. x Rp 50.000	1.000.000	
Pelacakan dokumentasi	20 bendel x Rp	1.000.000	

	50.000		
Transportasi	30 hari x Rp 50.000	1.500.000	
Pengkajian buku dan dokumen	30 hari x Rp 50.000	1.500.000	
Analisis Data		500.000	
Sub Jumlah		5.500.000	5.500.000
Laporan			
Penyusunan Draft Laporan		500.000	
Penggandaan Laporan	10 eksp. x Rp 50.000	500.000	
Sub Jumlah		1.000.000	1.000.000
Seminar Hasil Penelitian dan Publikasi			
Penyelenggaraan Seminar		300.000	
Publikasi Jurnal Ilmiah		700.000	
Sub Jumlah		1.000.000	1.000.000
JUMLAH			Rp 10.000.000

Daftar Pustaka

- Andre Ata Ujan. (2011). *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: INDEKS.
- Bambang Sigap Sumantri. (2015). "Mulai dari Hal Kecil". *Harian Kompas*. Edisi 5 Januari 2016, halaman 16
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2014). *Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta 2014*. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta
- Edi Suharto. (2011). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Hairus Salim dan Suhadi. (2000). *Membangun Pluralisme dari Bawah*. Yogyakarta: LKIS
- Inajati Adrisijanti. (2007). "Kota Yogyakarta Sebagai Kawasan Pusaka Budaya Potensi Dan Permasalahannya". Makalah disajikan dalam *Diskusi Sejarah "Kota dan Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah"*, di Balai Pelestarian Sejarah dan Tata Nilai Tradisional Yogyakarta.
- Laski, Harold J. (1947). *The State in Theory and Practice*. New York: The Viking Press
- Lexy J Moleong. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Lucia Junungsih. (2015). "Multikulturalisme di Yogyakarta dalam Perspektif Sejarah". Makalah disajikan dalam *Seminar Dies ke-22 Fakultas Sastra "Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta dalam Perspektif Bahasa, sastra, dan Sejarah"*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Muchlis Hamdi. (2002). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Miriam Budiardjo. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Parsons, Wayne. (2014). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Jakarta: Prenada Media Group
- Parekh, Bhikku. (1997). "National Culture and Multiculturalism", dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Culture Regulation*, London: Sage Publications
- Samodra Wibawa. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Sayekti Pujosuwarno. (1992). *Penulisan Usulan dan Laporan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lemlit IKIP Yogyakarta
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Cetakan Keempat*. Bandung: Alfabeta
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI
- Winarno, Budi. (1989). *Teory Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PAU-UGM
- “Sultan Sebut Konflik Etnis Usik Kedamaian Yogyakarta”. Diambil pada tanggal 20 Januari 2016, dari <http://www.republika.co.id/>.

LAMPIRAN: CURRICULUM VITAE PENELITI

A. Identitas Diri

- 1 Nama Lengkap (dengan gelar) : Dr.Suharno,S.Pd.,M.Si.
- 2 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 3 Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- 4 Pangkat/Golongan : Pembina/ Iva
- 5 NIP : 19680417 200003 1001
- 6 NIDN : 0017046807
- 7 Tempat dan Tanggal Lahir : Kab Semarang, 17 April 1968
- 8 E-Mail : suharno1968@yahoo.com
- 9 Alamat Rumah : Jln. Kaper 337A Nitikan, Umbulharjo, Yogyakarta
- 10 Nomor Telepon/ HP : 081313949490
- 11 Alamat Kantor : Karangmalang Yogyakarta
- 12 NomorTelepon/Faks : (0274) 548202/ Fax (0274) 548201
- 13 Mata Kuliah yg Diampu : Kebijakan Publik
: Sosiologi Politik

B. Riwayat Pendidikan

Identitas	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IKIP Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada	Universitas Gadjah Mada
Bidang Ilmu	PMP dan KN	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Negara
Tahun Masuk-Lulus	1988-1994	1998-2002	2005-2011
JudulSkripsi/Tesis/Disertasi	Hubungan Sikap Mental Masyarakat dan Usaha- Usaha Kepala Kelurahan se Kota Surakarta dengan Keberhasilan Meraih Adipura Kencana	Perencanaan Wilayah Kabupaten Bantul Pra Isu PII	Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat Multikultural
Nama Pembimbing/Promotor	Drs. M. Subardi, M.Pd dan Drs.Ekram Pawiroputro, M.Pd.	Prof. Dr. Agus Dwiyantodan Ambar Teguh, M.Si	Prof. Dr. Warsito Utomo dan Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	2013	Pengembangan Model <i>Peace-building Teaching and Learning: Intervensi Pencegahan Kekerasan Melalui Pendidikan Formal</i>	Penelitian Strategi Nasional (Ketua Peneliti)	75
2.	2013	Pengembangan Model Resolusi Konflik untuk Masyarakat Multikultural di Poso dan Ambon (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Kotim, Kalimantan Tengah)	Penelitian Hibah Bersaing (Ketua Peneliti)	50
3.	2012	Pengembangan Model Penyelesaian Konflik	DIPA UNY (Ketua Peneliti)	10
4.	2011	Politik Rekognisi dalam Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Konflik di dalam Masyarakat Multikultural	Disertasi Fisipol UGM (Mandiri)	
5.	2011	Sikap Mahasiswa FIS dalam Ujian Semester	DIPA UNY (Ketua Peneliti)	7,5
6.	2009	Implementasi Konvensi Anti Diskriminasi Perempuan dalam Politik Hukum Indonesia	DIPA UNY (Ketua Peneliti)	5

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1.	Maret 2014	Mengasah kemampuan menulis karya ilmiah guru SMP Muhammadiyah Karangasem Depok Sleman	IKA-UNY	2,5
2.	Maret 2014	Semiloka Media Pembelajaran Guru-Guru SDM se- DIY		2
3.	Pebruari 2014	Pengabdian ttg Penelitian Tindakan Kelas SMP Muh Karangasem Depok Sleman	IKA-UNY	2,5
4.	Mei 2014	Juri Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	
5.	April 2013	Juri Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal	MPR RI	

		Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI		
6.	Maret 2012	Juri Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	
7.	Maret 2011	Pengembangan Laboratorium IPS di Sekolah se-DIY	DIPA UNY	5
8.	Maret 2011	Juri Lomba Cerdas Cermat UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI Tingkat SLTA di Prop. DIY yang diselenggarakan oleh MPR RI	MPR RI	

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
	2011	Kebijakan berbasis Politik Rekognisi dan Resolusi Konflik Etnik: Kisah sukses dari Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah	2011	Ide-ide untuk pementapan jati diri ilmu administrasi negara
	2011	Menyoal Kebijakan Ujian Nasional Pendidikan Agama; Makalah diterbitkan Kedaulatan Rakyat	Maret 2011	Yogyakarta: Harian Kedaulatan Rakyat
	2009	Membangun Kebangsaan Multikultural dari Bawah; Makalah diterbitkan di Harian Umum Kedaulatan Rakyat	Oktober 2009	Yogyakarta: Harian Kedaulatan Rakyat

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Seminar tentang Penelitian bagi guru Muhammadiyah DIY	Pengkajian terhadap seluk-beluk PTK	Maret 2014 di Hotel Bintang Fajar Yogyakarta
2	Semiloka <i>on</i>	Kepemimpinan Partisipatoris	Februari 2012 di

	<i>the job trining</i> bagi Kepala-Kepala Sekolah di Yogyakarta		PPPG Matematika
3	Seminar Kepemimpinan	Membangun Kepemimpinan yang Santun, Demokratis, Memahami Hak Kewajiban	Januari 2012 diWisma PU Yogyakarta
4.	Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara	Kebijakan Berbasis Politik Rekognisi; Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional	27-28 Maret 2011 di Universitas Negeri Yogyakarta
5.	Seminar dan Pelatihan untuk membangun Good Governance	Mewujudkan Good Governance Kabupaten Sleman, disampaikan dalam Pelatihan bagi Perangkat Desa se Kabupaten Sleman	14 November 2011 di Kantor Pemda Sleman

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Dasar-Dasar Kebijakan Publik	2013	238	Yogyakarta: Penerbit Ombak

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor /ID

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	InstitusiPemberiPenghargaan	Tahun
1.	Satya Lencana 10 Tahun	Presiden RI	2014
2.	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika,	Ketua MPR RI	2014

	Negara Kesatuan RI		
3.	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI	2013
4.	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI	2012
5.	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI	2011
6.	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI	2010
7.	Piagam Penghargaan sebagai ketua KAPASGAMA oleh Ketua Umum KAGAMA	Sri Sultan Hamengku Buwono X	2010
8.	Piagam Penghargaan sebagai Juri Nasional LCC UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI	Ketua MPR RI	2009